

Industri Kelapa Sawit Indonesia Pasca RED2 Uni Eropa

Zainal Abdi¹, Pazli², Tri Joko Waluyo³

^{1,2,3} Prongram Studi Megister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Riau
Email:zainalabdi1271990@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara penghasil CPO terbesar di dunia dan kelapa sawit merupakan salah satu perkebunan utama bagi masyarakat Indonesia, negara-negara yang ada dalam Uni Eropa merupakan pasar ekspor produk kelapa sawit Indonesia, Uni Eropa menggunakan cpo sebagai produk pangan dan juga sebagai sumber energi terbarukan yang merupakan komitmen Uni Eropa dalam protocol Kyoto dalam mengurangi emisi global. Kebijakan RED ini, setiap Negara di Eropa wajib menggunakan minimal sepuluh persen bahan bakar dan transportasi mereka pakai menggunakan energi ramah lingkungan yang mereka produksi berupa energi terbarukan. Akan tetapi pada 2019 Uni Eropa mengeluarkan aturan baru berupa RED2 sebagai pengembangan lebih lanjut dan revisi Arahan Energi Terbarukan yang lama. Di dalam aturan ini disebutkan bahwa adanya keinginan untuk menghentikan minyak kelapa sawit untuk bahan bakar hayati di Uni Eropa pada saat 2030 mendatang juga rencananya pada tahun 2024 akan dimulai pengurangannya. Kelapa sawit dinilai sebagai penyebab deforestasi. Dalam susunan itu, kelapa sawit digolongkan sebagai sumber energi terbarukan yang berisiko tinggi karena kandungan emisi minyak sawit ILUC kisaran 109 gCO₂e/MJ ini adalah yang tertinggi dibandingkan bahan bakar nabati yang lain, dengan minyak kedelai di urutan kedua (75 gCO₂e/MJ), disusul oleh minyak kedelai, minyak lobak dan sun flower oil. Sebagai Negara industri sawit tentunya kebijakan ini dianggap diskriminatif dan UE sangat merugikan untuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat respon terhadap RED2 dan bagaimana upaya Indonesia dalam mengembangkan industri kelapa sawit pasca aturan RED2 Uni Eropa. Dalam penelitian ini menggunakan konsep teori strategi untuk menjelaskan respon Indonesia terhadap aturan RED 2 bagaimana menghadapinya serta untuk menggambarkan upaya Indonesia dalam menyelamatkan industri kelapa sawitnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjabarkan Indonesia sebagai aktor Negara. Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data library resect dengan sumber berupa artikel, jurnal internasional, buku, website, serta penelitian terdahulu sebagai acuan penulis dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini menjelaskan Indonesia melakukan upaya strategis pada industri kelapa sawit yaitu perbaikan sumberdaya manusia, penguatan riset, perbaikan administrasi, percepatan sertifikasi ISPO, sarana dan prasarana, perbaikan tatakelola sertifikasi lahan, roadmap kelapa sawit, energi terbarukan kelapa sawit, pemerataan kelapa sawit selain upaya strategis ini pemerintah juga melakukan strategi dalam meningkatkan ekspor sawit dan produk turunannya yaitu dengan penguatan diplomasi perdagangan pemenuhan energi terbarukan dalam negeri, strong commitment terkait hilirisasi kelapa sawit, upaya kampanye positif, pendekatan dengan Negara mitra, pelarangan narang dengan label palm oil free, edukasi sawit yang berkelanjutan baik di dalam maupun luar negeri, serta gugatan ke WTO sebagai organisasi perdagangan dunia.

Kata Kunci: RED2, Strategi, Upaya Strategis, Peningkatan Ekspor Sawit dan Turunannya

Abstract

Indonesia is the largest CPO producing country in the world and palm oil is one of the main plantations for the Indonesian people, the countries in the European Union are export

markets for Indonesian palm oil products, the European Union uses CPO as a confectionery product and also as a source of renewable energy. is the commitment of the European Union in the Kyoto protocol in reducing global emissions. This RED policy, every country in Europe is required to use a minimum of ten percent of their fuel and their transportation uses environmentally friendly energy that they produce in the form of renewable energy. However, in 2019 the European Union issued a new regulation such as RED2 as a further development and revision of the old Renewable Energy Directive. In this regulation, it is stated that there is a desire to stop palm kernel oil as a biofuel in the European Union by 2030 and the plan is to start reducing it in 2024. palm oil is rated as a cause of deforestation. In that arrangement, palm oil is classified as a high-risk renewable energy source because the ILUC emission content of palm oil in the range of 109 gCO₂e/MJ is the highest compared to other biofuels, with soybean oil in second place (75 gCO₂e/MJ). followed by soybean oil. rapeseed oil and sun flower oil. As a palm oil industrial country, of course, this policy is considered discriminatory and the EU is very detrimental. for Indonesia. This study aims to see the response to RED2 and how Indonesia's efforts to develop the palm oil industry after the European Union's RED2 regulations. the palm. This study uses a qualitative approach to describe Indonesia as a state actor. In this study using library resect data collection with sources in the form of articles, international journals, books, websites, and previous research as a reference for authors in research. Acceleration of ISPO certification, facilities and infrastructure, improvement of land certification management, oil palm roadmap, renewable energy palm oil, oil palm rejuvenation. Apart from this strategic effort, the government has also carried out a strategy in increasing exports of palm oil and its derivative products, namely by strengthening trade diplomacy to fulfill renewable energy in country, strong commitment related to the downstreaming of palm oil, positive campaign efforts, approaches with partner countries, prohibition of producers with the palm oil free label, sustainable palm oil education both at home and abroad, as well as a lawsuit to the WTO as an organization. i world trade.

Keywords: RED2, Strategy, Strategic Efforts, Increasing Palm Oil Exports and Its Derivatives

PEDAHULUAN

Buah sawit sebagai hasil panen kelapa sawit dan kelapa sawit ini salah satu diva pertanian Indonesia. Kelapa sawit juga merupakan salah satu produk andalan Indonesia di bursa global Minyak sawit yang diolah menjadi Unrefined Palm OilCPO memiliki sumber pemasukan masyarakat, khususnya sebagai produk pilar bukanmigas Indonesia yang dikirim sebagai pekerja perdagangan asing yang terpisah dari minyak juga gas. Dari 2013 hingga 2015, estimasi tarif minyak sawit olahan berkisar antara US \$ 20.660,4 hingga 20.746,9 juta dolar. Menurut tugasnya, pada 2015 porsi perdagangan sawit mencapai 19,45 persen.

Untuk memastikan pencapaian sasaran penggunaan tenaga terbarukan & tenaga iklim tahun 2020, hingga ketika ini Uni Eropa akan terus berkomitmen pada memastikan keberlanjutan berdasarkan bioenergi & penggunaan biofuel menjadi pengganti bahan bakar fosil. Dengan memanfaatkan tenaga yg bersih, aman, terjangkau dan berkelanjutan, Uni Eropa jua terus maju menuju Energy Union. Pada 14 Juni 2018 Komisi Eropa balik mengeluarkan sasaran baru yg mengikat pada penggunaan tenaga terbarukana yaitu setiap negara anggota harus mencapai sasaran sekurang-kurangnya 32 dalam hal penggunaan tenaga terbarukan. Kemudian dalam tahun 2019 sasaran baru tadi menerima persetujuan berdasarkan Parlemen Eropa, Dewan Eropa dan negara-negara anggota yg lalu dituangkan

pada kebijakan baru yg dikenal menggunakan Kebijakan RED II (Renewable Energy Directive II).

Dengan aturan, Uni Eropa sudah mengidentifikasi kelapa sawit merupakan sumber energi terbarukan berdampak risiko tinggi juga tidak berkelanjutan pada (ILUC). Klasifikasi terhadap Minyak Sawit berdasarkan pada laporan Komisi Eropa dan Dewan UE yaitu Report on the State of Expansion of Food Crop Production and Associated Tariffs Worldwide. Laporan tersebut menemukan bahwa minyak sawit memicu deforestasi selama periode 2008-2015. Hal ini menyebabkan Uni Eropa secara bertahap mengurangi penggunaan minyak sawit per Januari 2024

Uni Eropa adalah pasar ekspor utama Indonesia untuk produk minyak sawit mentah. Uni Eropa telah bekerja sama dengan Indonesia dalam impor CPO sejak 2008. Belanda dan Italia adalah dua negara pengimpor utama minyak sawit mentah di UE. Ekspor produk CPO ke Eropa menjadi benchmark untuk negara lain yaitu China, dan India.

Sebagai Negara industri sawit tentunya kebijakan diskriminatif UE sangat merugikan untuk Indonesia, kelapa sawit adalah salah satu produk ekspornya Indonesia. selain minyak dan gas bumi juga sangat penting sebagai sumber devisa negara. Menurut Departemen Perdagangan, minyak Sawit menyumbang USD16,53 miliar terhadap devisa negara nilai ekspor Indonesia di tahun 2018 masing-masing USD17,1 miliar dan USD14,1 miliar dan total nilai perdagangan UE menjadi \$31,2 miliar UE merupakan tujuan minyak sawit yang potensi untuk Indonesia. Tiga . pasar sawit Indonesia adalah India (671jutas), Uni Eropa (478jutas) dan China (4,41jutas). .dengan ini tidak ada tanda tanda Indonesia kehilangan pasar produk kelapa sawit.

Apabila terjadi kelebihan pasokan minyak sawit akan merugikan Indonesia. Selanjutnya, neraca dan kinerja ekspor Indonesia di sektor selain migas sebagian besar ditopang oleh interaksi perdagangan antara kelapa sawit dan Eropa yaitu 1,66% per tahun. Bukan hanya drop pada PDB Indonesia juga neraca perdagangan dan ekspor juga berdampak tekanan dari sisi ketenagakerjaan melemahkan perekonomian Indonesia yang kemudian dapat mengakibatkan meningkatnya hilangnya pekerjaan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif ekplanatif yaitu suatu pendekatan untuk menelusuri dan memahamisatu gejala sentral. Penelitian ini akan membahas upaya Indonesia dalam menyelamatkan industry kelapa dari upaya hambatan ataupun diskriminasi terhadap produk kelapa sawit dan pengembangan industry kelapa sawit yaitu pasca RED2 Uni Eropa.

Data kualitatif berupa kata, gambar atau rekaman video. Berbagai informasi dan data yang digunakan sebagai bahan analisis oleh para peneliti untuk penelitian ini berasal dari buku, jurnal, artikel, sebagai data sekunder dan dari wawancara, informasi dan bahan pendukung lainnya sebagai data primer

Dalam penelitian ini mengumpulkan kajian literatur atau studi terdahulu. Studi literasi mencoba mengumpulkan sumber data yang tertulis atau direkam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi terdahulu, yang berarti melacak literasi dan mempelajarinya serta menggunakan data sekunder, data yang telah dihasilkan pada survei, namun belum diperas dan analisis lebih lanjut terhadap data tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang sangat berguna, apakah itu dari majalah, jurnal, buku, atau internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi adalah sebuah rencana yang komprehensif yang mengintegrasikan segala *resources* dan *capabilities* yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk memenangkan kompetisi. Jadi strategi adalah rencana yang mengandung cara komprehensif dan integrative yang dapat dijadikan pegangan untuk bekerja, berjuang dan berbuat guna memenangkan kompetisi. unsur-unsur pada strategi yaitu *bargaining*(tawar menawar), *threats* (ancaman), *mutual distrusts* (kepercayaan dalam kerjasama) , dan keseimbangan antara kerjasama dan konflik.

Eropa melegalkan/membuat regulasi turunan RED II di 13 maret 2019 dengan judul Delegated Regulation untuk melengkapi RED2 dengan European Commission. Dengan aturan, Uni Eropa sudah mengidentifikasi kelapa sawit merupakan sumber energi terbarukan berdampak risiko tinggi juga tidak berkelanjutan pada (ILUC). Klasifikasi terhadap Minyak Sawit berdasarkan pada laporan Komisi Eropa dan Dewan UE yaitu Report on the State of Expansion of Food Crop Production and Associated Tariffs Worldwide. Laporan tersebut menemukan bahwa minyak sawit memicu deforestasi selama periode 2008-2015. Hal ini menyebabkan Uni Eropa secara bertahap mengurangi penggunaan minyak sawit per Januari 2024. Kebijakan Uni Eropa ini tentunya akan berpengaruh terhadap industri kelapa sawit, dalam hal ini tentu nya perlu ada tindakan yang setrategis dalam upaya menyelamatkan industri kelapa sawit pasca adanya kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa yang mendriskinasi prospek berbasis kelapa sawit.

Pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Dengan berkembangnya industri kelapa sawit atau sustainable palm oil, kita dapat menerapkan berbagai prinsip yang saling berkelanjutan supaya menaikkan hasil kelapa sawit, yang juga dapat mempengaruhi permintaan minyak sawit di masa depan.

Upaya Setrategis Kelapa Sawit

1. Peremajaan perkebunan kelapa sawit

Pemerintah dan stakeholder kelapa sawit melakukan upaya dalam pencapaian target peremajaan sawit rakyat (PSR) tahun 2021. Salah satu upaya percepatan realisasi PSR ini adalah dengan dilakukannya Penandatanganan Kerja Sama Peremajaan Sawit Rakyat Melalui Kemitraan pemerintah Indonesia menargetkan tahun 2020-2022 peremajaan kelapa sawit sebesar 540.000 hektare.

Penandatanganan Kerja Sama pelaksanaan PSR antara 6 Perusahaan anggota dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan 1 Perusahaan Milik Negara yaitu PTPN VI dengan 18 KUD/Koperasi/Gapoktan anggota dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) yang berasal dari 6 Kabupaten yaitu Kotabaru (Kalsel), Serdang Bedagai (Sumut), Muaro Jambi dan Merangin (Jambi), Kampar dan Indragiri Hulu (Riau), dengan total luas lahan dalam perjanjian PSR ini sebesar 18.821 hektare. Program peremajaan sawit rakyat ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat.

2. Energy terbarukan

Biodiesel adalah bahan bakar nabati untuk aplikasi mesin/motor diesel berupa ester metil asam lemak (fatty acid methyl ester/FAME) yang terbuat dari minyak nabati atau lemak hewani melalui proses esterifikasi/transesterifikasi. Untuk saat ini, di Indonesia bahan baku biodiesel berasal dari Minyak Sawit (CPO). Selain dari CPO, tanaman lain yang berpotensi untuk bahan baku biodiesel antara lain tanaman jarak, jarak pagar, kemiri sunan, kemiri cina, nyamplung dan lain-lain

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024, Pembangunan Energi Terbarukan Berbasis Kelapa Sawit menjadi salah satu proyek strategis nasional. Penetapan Program Energi Terbarukan Berbasis Kelapa Sawit ditujukan untuk mendukung peningkatan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional menuju 23% pada tahun 2025. Salah satu amanat Perpres No. 61/2015 jo. Perpres No.66/2018 adalah dana sawit digunakan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.

Program pengembangan dan penggunaan BBN yang telah berjalan adalah program mandatori biodiesel. Program ini mewajibkan pencampuran bahan bakar solar dengan biodiesel berbasis sawit. Program mandatori biodiesel mulai diimplementasikan pada 2008 dengan kadar campuran biodiesel sebesar 2,5%. Secara bertahap kadar biodiesel meningkat hingga 7,5% pada tahun 2010. Pada periode 2011 hingga 2015 persentase biodiesel ditingkatkan dari 10% menjadi 15%. Selanjutnya pada 2016 ditingkatkan kadar

biodiesel hingga 20% (B20) dan pada 23 Desember 2019 Presiden Joko Widodo meresmikan penggunaan B30

Selain Biodiesel, Pemerintah juga telah mengatur BBN jenis lainnya yakni Bioetanol yang dikenal dengan istilah E100 dan Minyak Nabati Murni atau dengan istilah O100. Saat ini Pemerintah juga aktif mendorong pengembangan BBN biohidrokarbon yang karakteristiknya sama atau bahkan lebih baik daripada senyawa hidrokarbon/BBM berbasis fosil. BBN Biohidrokarbon yang ramah lingkungan ini dapat langsung digunakan (*drop-in*) sebagai substitusi BBM fosil tanpa perlu penyesuaian mesin kendaraan. BBN biohidrokarbon ini dapat dibedakan menjadi *green-gasoline*, *green-diesel*, dan *bioavtur*.

3. Percepatan sertifikasi ISPO

Sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan terus digenjut. Upaya percepatan terus dilakukan terutama untuk mendorong sertifikasi pada kelompok petani sawit. Setelah 10 tahun penerapan sertifikasi pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) berjalan di Indonesia, terdapat 755 sertifikat yang telah diterbitkan untuk perkebunan swasta dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dengan luas lahan 5,8 juta hektar dari total 9,6 juta hektar. Namun, sertifikat ISPO yang diterbitkan untuk kelompok petani, koperasi, dan badan usaha milik desa (bumdes) saat ini baru mencapai 20 sertifikat dengan luas lahan 12.600 hektar atau hanya 0,18 persen dari total lahan yang ada.

Pemerintah melalui komisi ISPO sementara dalam Permentan No 30/2020 dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi. Dengan prinsip dan kriteria yang sama dengan Permentan No 11/2015 sudah mencapai 139 sertifikat ISPO. Permentan No.38 Tahun 2020. Dalam Permentan baru ini seluruhnya dilakukan lembaga Sertifikasi (LS). Semenjak Juli 2020-Agustus 2021 mampu menerbitkan 139 sertifikat. tujuan sistem sertifikasi ISPO yang tertuang dalam Perpres No 44 tahun 2020 pasal 3. *Pertama*, memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai Prinsip dan Kriteria ISPO. *Kedua*, meningkatkan keberterimaan dan daya saing hasil perkebunan kelapa sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional. Dan, *ketiga* meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca.

4. Roadmap kelapa sawit nasional lintas sector

Pada 2019 pemerintah melaksanakan gelar pertemuan untuk menerima masukan dari pelaku kepentingan dalam menyusun roadmap kelapasawit, Pertemuan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian dan didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) ini dihadiri sejumlah kalangan dari pemerintahan, pelaku usaha, petani, akademisi, dan lain-lain.

Terdapat sejumlah tujuan yang diharapkan dicapai dari kegiatan penyusunan roadmap kelapa sawit. Pertama, melaksanakan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan arah pengembangan kelapa sawit nasional yang berkelanjutan sampai tahun 2045. Kedua, melaksanakan penajaman terhadap arah pengembangan industri kelapa sawit nasional mulai dari hulu sampai hilir terhadap konsep roadmap yang telah ada. Ketiga, melakukan pemutakhiran data kelapa sawit. Keempat, terbentuknya tim terintegrasi yang mendukung tersedianya roadmap nasional kelapa sawit berkelanjutan,

5. Sarana dan prasarana

Keputusan Ditjenbun Nomor 144/Kpts/OT.050/4/2020. Tertuang darana dan prasarana tentang kelapa sawit. Yang isinya ialah pertama pupuk dan pestisida, untuk sarana dan prasarana tersebut diberikan melalui kegiatan pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang telah memproduksi atau intensifikasi melalui paket per hektar. Kemudian Paket alat paska panen, sarana dan prasarana tersebut diberikan sesuai dengan norma pada perkebunan kelapa sawit melalui paket per hektar, selanjutnya pembuatan/peningkatan jalan. Sarana dan prasarana tersebut diberikan sesuai dengan norma pada perkebunan kelapa sawit dan/atau sesuai hasil penilaian konsultan SID (survei, investigasi dan desain) melalui paket per hektar dan Serta berupa Paket rehabilitasi tata kelola air, untuk

sarana dan prasarana tersebut diberikan sesuai dengan norma pada perkebunan kelapa sawit dan/atau sesuai hasil penilaian konsultan SID melalui paket per unit.

6. Pengembangan sdm

Untuk mengembangkan industry kelapa sawit tentunya di perlukan pengembangan sumberdaya manusia yang professional yang berkopetensi di seektor kelapa sawit, pemerintah berupaya eningkatkan kualitas sdm melalui jalur pendidikan yaitu dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, kompetensi, kemandirian, & daya saing kepada sasaran yg diharapkan. Beasiswa Pendidikan tinggi vokasi & akademik Sasaran : Pekebun, Keluarga Pekebun, & ASN Bidang Kelapa Sawit. Tidak hanya melalui system pendidikan pemerintah juga berupaya melalui jalur pelatihan untuk mingkatan kompetensi secara simultan yg meliputi : Persiapan & Sosialisasi, Pelatihan, Pendampingan, Asistensi / Monitoring. Pelatihan Teknis dan Pelatihan Non Teknis (Pemberdayaan). Sasaran : Pekebun, Keluarga Pekebun, Penyuluh, Tenaga Pendamping, ASN, Masyarakat sekitar kebun. Kegiatan ini bertujuan agar Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, kompetensi, kemandirian dan daya saing serta Meningkatkan kemampuan teknis, manajerial dan kewirausahaan melalui pendidikan tinggi vokasi secara formal.

7. Perbaiki tata kelola sawit

Dalam memperbaiki perkebunan sawit pemerintah berupaya untuk memperbaiki pengelolaan sawit terutama di kawasan hutan untuk itu pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 833/2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Sawit Indonesia pada 2019, seluas 16.381.959 hektar. Ia merupakan hasil evaluasi dan monitoring regulasi sawit, serta pemerintah mengeluarkan regulasi dengan harapan bisa menyelesaikan tata kelola perkebunan sawit seperti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan 2019-2024, dan Inpres Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Pekebunan serta Peningkatan Produktivitas Pekebunan Sawit.

8. Setrategi Peningkatan Ekspoe Sawit dan Turunannya

Menanggapi Uni Eropa, Indonesia mengajukan gugatan DS 593 kepada WTO oleh pemerintah upaya ini di lakukan agar sawit Indonesia bebas dari diskriminasi eropa. Indonesia melihat RED II dan DR ILUC sebagai motif ekonomi dan diskriminasi serta politik yang berbahaya yang dapat mempersulit ke pasar minyak sawit di Eropa. Upaya yang berbeda terhadap barang-barang ini menodai prinsip perdagangan yang adil dan bebas yang disepakati dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia. pemerintah Indonesia melalui (BPDPKS), akan memperbaharui strategi melawan kampanye hitam eropa di pasar dunia, khususnya di Eropa. "Strategi lanjutan kami tidak lagi defensif, itu juga harus ofensif

Sebagai .kelompok .advokasi .ofensif, .BPDPKS .mendukung .serangkaian .tuntutan .hukum .yang .diajukan .oleh .pemerintah .Indonesia .ke .WTO .dengan .mendana .promosi .kelapa .sawit .untuk .mengadakan .segi .hukum .dan .aspek .data .ilmiah .yang .diperlukan .dalam .litigasi .panel .DS .593 .pada .bulan .Juli . . .29, .2020.

9. Penguatan diplomasi perdagangan sertifikasi ISPO

Dalam upaya melindungi penjualan kelapa sawit di wilayah eropa dan amerika, pihak petani dan prusahaan kelapa sawit di Indonesia sudah memperbaiki produksi perkebunan kelapa sawit. dan pasar Amerika dalam permintaan. Pemerintah Indonesia juga memperkenalkan Sistem Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) sebagai upaya keseriusan meningkatkan kualitas minyak sawit asli upaya nyata dalam meningkatkan produksi kelapa sawit di indonesia adalah berkurangnya kerusakan hutan akibat budidaya kelapa sawit, yang dulunya kisaran 2juta hektar per tahunnya, berkurang pada posisi 400.000 hektar pada 2018 dan 2020.

Di sektor hulu, Indonesia sudah memiliki Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pertanian nomor 38 tahun 2020. Pemerintah Indonesia pun menerbitkan Perpres nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/ ISPO dan Permentan nomor 38 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi ISPO. Ada lima area yang diperbaiki melalui ISPO adalah

pengambilan keputusan dan penerbitan sertifikat yang dilakukan pihak ketiga yang independen. Strategi ini menjawab keraguan mengenai independensi dan transparansi. Kedua, kompetensi auditor yang melakukan tugas diukur melalui sertifikat kompetensi. Area ketiga adalah bahwa ISPO diberlakukan tidak hanya bagi perusahaan perkebunan besar, tetapi juga pekebun kecil. Area keempat perbaikan juga dilakukan dengan pelibatan masyarakat sipil dalam kelembagaan ISPO.

Sampai akhir tahun 2020, sertifikasi ISPO di hulu, yaitu di perkebunan, catatan yang ada baru diterbitkan 682 sertifikat. Dengan luasan 5,8 juta hektar yang sudah bersertifikat, dari 16,38 juta hektar. Artinya, baru kurang lebih 35 persen luasan kebun sawit yang sudah ber-ISPO dibandingkan total luasannya, yang 16,38 juta hektar itu.

ISPO berlaku bagi perusahaan yang memproses, memproduksi, memasok, dan mengekspor minyak sawit dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari perkebunan sawit. Tujuh prinsip dan kriteria atau indikator ISPO di industri hulu sawit meliputi legalitas usaha perkebunan, penerapan praktik perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, tanggung jawab terhadap tenaga kerja, tanggung jawab terhadap sosial dan ekonomi masyarakat, transparansi dan peningkatan usaha berkelanjutan.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam persaingan perdagangan minyak nabati saat ini tidak hanya meningkatkan penerimaan Certificates for Sustainable Palm Oil Plantations (ISPO) di negara-negara konsumen, tetapi juga meluncurkan counter-campaign oleh negara-negara ke negara-negara tersebut. Tidak suka kelapa sawit atau dipromosikan sebagai pesaing kelapa sawit secara besar-besaran oleh beberapa negara di Uni Eropa. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pelaku kelapa sawit (seperti diplomasi, advokasi, kampanye positif atau kontra kampanye terhadap berbagai kampanye negatif yang menyasar kelapa sawit, dan Indonesia pada dasarnya menemukan kontra kampanye terhadap posisi Indonesia sama sekali tidak berdasar.

Pengembangan industri pengolahan itu penting. Hal ini membuat Indonesia kurang bergantung pada ekspor minyak sawit. Penggunaan B20 juga dapat meningkatkan penyerapan minyak sawit di dalam negeri. Namun, itu dianggap tidak efektif karena tidak banyak digunakan.

10. Strong commitmen indonesia

Pemerintah saat ini terus mengembangkan kebijakan yang mendorong *domestic demand* dari produk sawit, antara lain melalui pengembangan biodiesel (B30) sebagai salah satu alternatif BBM untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil. Program B30 telah berkontribusi dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk sekitar 23,3 juta ton karbon dioksida (CO₂) pada tahun 2020. Pemerintah berkomitmen untuk mendukung program B30 pada tahun 2021 yang bertujuan untuk menjaga stabilisasi harga CPO. Dengan target alokasi penyaluran sebesar 9,2 juta KL, komitmen Pemerintah ini dapat menghemat devisa sebesar USD 8 miliar akibat dari berkurangnya impor solar.

Selain itu, pada tahun 2021 ini Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk melakukan peremajaan (*replanting*) sebanyak 180 ribu hektar kebun kelapa sawit milik petani. Upaya ini dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat dengan umur tanaman tua yang produktivitasnya kurang dari 3-4 ton/ha. *Replanting* dilakukan dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan *Good Agriculture Practices* (GAP), sehingga terjadi peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya secara optimal.

11. Pemenuhan energy terbarukan dalam negeri

Pemerintah tengah mengupayakan adanya terobosan pemanfaatan biomassa guna mengurangi peran batubara yang masih dominan secara nasional dan mendorong capaian target bauran EBT pada tahun 2025. Hingga akhir tahun 2019, bauran EBT mencapai 9,15% dimana 6,2% berasal dari PLT EBT dan 2,95% berasal dari BBN

(biodiesel). Pengembangan biomassa yang akan dioptimalkan antara lain bersumber dari sampah dan pelet biomassa dari tanaman energi.

Sebagai informasi, potensi biomassa untuk listrik dapat bersumber antara lain dari kelapa sawit, tebu, karet, kelapa, sekam padi, jagung, singkong, kayu, limbah ternak dan sampah kota, dengan total potensi di seluruh wilayah Indonesia sebesar 31.654 Mwe. Kapasitas terpasang PLT Bioenergi saat ini 1.889,8 MW dengan jumlah kapasitas on grid sebesar 206,02 MW dan jumlah kapasitas off grid sebesar 1.683,78 MW.

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan program mandatori pencampuran 70% solar dengan 30% biodiesel (Program B30) pada 1 Januari 2020. Sampai saat ini Program B30 telah berjalan selama kurang lebih satu setengah tahun sebagai salah satu program prioritas nasional untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mencapai transisi energi bersih, khususnya di sektor transportasi. Program B30 telah dinikmati oleh para konsumen yang menggunakan mesin dengan bahan bakar diesel baik di sektor transportasi maupun sektor industri lainnya.

Pada tahun 2021 ini dengan total alokasi biodiesel sebesar 9.2 juta kL, didukung oleh 20 BU BBN yang mengikuti pengadaan FAME dan 20 BU BBM yang wajib melakukan pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar, hingga semester 1 telah berhasil menyalurkan biodiesel sebesar 4,3 juta kL (atau 46,7% dari target penyaluran biodiesel dalam negeri). Manfaat ekonomi dari implementasi biodiesel sampai dengan Semester I sebesar Rp 29,9 Triliun yang terdiri dari penghematan devisa sebesar Rp 24,6 Triliun dan nilai tambah dari CPO menjadi biodiesel sebesar Rp 5,3 Triliun. Selain itu, manfaat lain dari implementasi biodiesel adalah pengurangan emisi CO₂ sebesar 11,4 juta ton CO₂e.

12. Kampanye positif

Salah satunya tantangan industri ialah kampanye negatif dari negara lain. pemerintah bersama stakeholder kelapa sawit, telah melakukan upaya diplomasi, advokasi, dan kampanye positif terhadap kampanye negatif yang ditunjukkan kepada kelapa sawit. Menurut BPDPKS perkebunan kelapa sawit tersebar di 190 kabupaten di Indonesia dan telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah sentra. Sawit sebagai komoditas yang paling produktif menyumbang 42% dari total suplai minyak nabati dunia, pertumbuhan permintaan minyak nabati dunia meningkat 8,5 juta metrik ton setiap tahun. Meski di hantam badai pandemi tetapi industri sawit masih memperlihatkan kinerja ekspor yang baik.

Dari sisi peran media menghimbau manajemen komunikasi industri sawit ditingkatkan. Ia menjelaskan selama ini dewan pers menuntut media bersikap kritis termasuk kepada industri sawit, jika selama ini pemberitaan yang banyak muncul terkait industri sawit ialah hal negatif maka perlu ditinjau dari aspek suplai data yang ada. Selama ini media kemungkinan mendapat informasi yang kurang seimbang. Salah satu yang bisa dilakukan misalnya dengan mengajak wartawan ke pelosok perkebunan melihat keberhasilan sawit kemudian semua aspek ini yang saya kira BPDPKS harus langsung berhadapan lah dengan wartawan apa yang harus disiapkan agar teman teman wartawan mendapat informasi yang berimbang. Tentu perlu adanya kerjasama industry dan media untuk mendorong kebangkitan ekonomi dan masyarakat.

Salain itu BPDPKS juga berinisiatif untuk menggandeng ekosistem pendidikan nasional untuk turut berperan dalam upaya meluruskan fakta-fakta obyektif tentang sawit di masyarakat. Melalui penjelasan yang benar, informasi yang akurat serta pembahasan komprehensif sejak dari bangku sekolah, baik dari tingkat SD, SMP dan SMA, para pendidik diharapkan dapat membuka peluang untuk para siswanya dapat mengenal dan memahami cara kerja industri sawit secara lebih obyektif. BPDPKS mencoba menggandeng kalangan guru untuk ikut berperan dalam meluruskan pemahaman masyarakat tentang industri sawit nasional. Dimulai sejak dini melalui anak didiknya.

Pihak BPDPKS juga mengundang beberapa narasumber lain yang bakal membedah persoalan kampanye negatif sawit dari berbagai perspektif sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Diantaranya adalah Ketua Bidang Komunikasi GAPKI: Tofan Mahdi dan

juga *Head of Corporate Communication*, PT SMART, Wulan Suling. Juga ada Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat, untuk melawan kampanye negatif ini, perlahan masyarakat dapat mulai memahami secara obyektif manfaat dan kontribusi nyata industri sawit dalam perekonomian Negara.

Pemerintah dan pelaku usaha sawit telah melakukan promosi dan kampanye produk sawit di Jepang. Beberapa kegiatan promosi yang telah dilangsungkan antara lain bekerja sama dengan Trade Promotion Center (ITPC) di Osaka mengkampanyekan penggunaan produk turunan sawit. Yang dilaksanakan secara online. Kegiatan lainnya adalah berpartisipasi dalam pameran International Biomass Expo 2020 di Tokyo Februari lalu.

13. Pelarangan palm oil free

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan akan melawan kampanye hitam terhadap kelapa sawit Indonesia melalui pengawasan di produk makanan. Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, perlawanan yang dilakukan oleh pihaknya adalah larangan mencantumkan label Tanpa Mengandung Minyak sawit alias Palm Oil Free (POF).

Bagi UMKM diberikan sanksi pembinaan dan bagi perusahaan atau produsen besar akan diberikan sanksi administratif dan tentunya produk akan ditarik dari pasaran. Namun, jika barangnya adalah barang impor dan ilegal maka akan dikenakan sanksi pidana.

Pencantuman label "Palm Oil Free" menyalahi aturan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 67 Poin 1 Peraturan BPOM No.31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, dimana secara tidak langsung membandingkan dengan pangan olahan lain yang mengandung minyak sawit. Mengacu Codex General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods juga dilarang menampilkan informasi yang menyesatkan pada label pangan, termasuk pangan yang memiliki karakteristik tertentu. Pelabelan "Palm Oil Free" dapat menyesatkan dan menimbulkan asumsi negatif terhadap dampak kandungan sawit bagi kesehatan. Label pangan wajib memuat keterangan yang benar. Untuk itu Badan POM terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan dinas terkait untuk tidak melakukan pelabelan tersebut.

Kejasama dengan Negara mitra di sector kelapa sawit Indonesia-Belanda telah berlangsung kerja sama untuk meningkatkan *sustainability* kelapa sawit, yaitu melalui Kerja Sama Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan. Program senilai EUR 5 juta ini berlangsung selama 5 tahun sejak 2019-2023, dan memberikan program-program produksi kelapa sawit berkelanjutan bagi petani-petani di Sumatra dan Kalimantan, termasuk dukungan kepada petani kecil dalam memenuhi sertifikasi ISPO. Kerja sama akan diperluas mencakup juga minyak nabati lainnya dalam konteks kontribusi terhadap SDGs 2030.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat kita simpulkan pula bahwa upaya Indonesia dalam membangun industry kelapa sawit yaitu dengan melakukan upaya setrategis terhadap kelapa sawit di antaranya dengan melakukan peremajaan terhadap perkebunan kelapa sawit yang kurang produktif melalui PSR, serta pemerintah berupaya mengembangkan energy terbarukan berbasis kelapa sawit, melaksanakan percepatan ISPO sebagai upaya satandarisasi kelapasawit yang berkelanjutan, roadmap kelapa sawit juga diperlukan untuk mengembangkan industri kelapa sawit yang dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dalam sector kelapa sawit itu sendiri, pengembangan riset dan sdm terkait kelapa sawit juga sedang di upayakan pemerintah, baik dari segi tatakelola dan perbaikan kelembagaan dalam sector kelapa sawit Ekspor kelapa sawit juga merupakan hal mutlak di perhatikan pemerintah mengingat Indonesia merupakan Negara penggeksport produk kelapa sawit terbesar di dunia dan kegiatan ini tentunya menyumbang tidak sedikit sumber devisa negara, untuk itu pemerintah mempunyai upayanya setrategis dan meningkatkan ekspor produk kelapa sawit dan turunannya diantaranya sertifikasi ISPO yang dapat diakui internasional agar dapat menjadi rujukan syarat masuknya produk kelapa sawit ke Negara tujuan. melakukan

kampanye positif terhadap produk kelapa sawit yang dilakukan pemerintah, stakeholder, swasta dan lainnya dalam pameran internasional dan mengajak media untuk dapat melihat dan memberitakan bagaimana produk kelapa sawit Indonesia sudah melakukan upaya yang sesuai dengan program keberlanjutan dan ramah lingkungan terhadap produk kelapa sawit, melakukan gugatan ke WTO terkait RED2 Uni Eropa yang merupakan bentuk diskriminasi, pendekatan bilateral, larangan barang berlabel palm oil free yang ada di dalam negeri, zero tariff, strong commitment pemerintah terkait kegiatan perdagangan juga dilakukan.

Akan tetapi tentunya ada hambatan terhadap strategi Indonesia dalam strategi mengembangkan industri kelapa sawitnya yaitu dalam upaya perbaikan tata kelola lahan yang masih tumpang tindih serta perlunya adanya kebijakan lanjutan pemerintah terkait pengembangan kelapa sawit dalam negeri dalam hilirisasi serta tata kelola dan perizinan perkebunan rakyat. Hambatan dalam peningkatan ekspor kelapa sawit dan produksinya ialah masih adanya kampanye negatif dari negara tujuan yang sedang melakukan pengembangan terhadap produk minyak nabati non sawit dan juga Negara kompetitor.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.bpdp.or.id/hadapidiskriminasi-sawit-oleh-uni-eropa-bpdpks-dukung-gugatan-sengketa-di-wto>
- <https://konsultaskripsi.com/2017/09/06/teori-strategi-dalam-hubungan-internasional-skirpsi-dan-tesis/>
- Andre Ahmad Stiadi, potensi dampak penerapan red 2 terhadap perekonomian Indonesia, <http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/potensi-dampak-penerapan-red-ii-terhadap-perekonomian-indonesia.html>
- Kementerian Perdagangan 2014 *Profil Ekonomi*
Diakses dari, <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/10-main-and-potential-commodities/10-main-commodities> (di akses pada 5 Januari 2020)
- <https://news.majalahortus.com/ispo-menuju-pengakuan-internasional/>
- <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/2917/menajamkan-daya-saing-komoditas-cpo-indonesia>
- <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3223/komitmen-indonesia-bagi-pembangunan-sawit-berkelanjutan>
- <https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/06/11/2556/optimalisasi.pemanfaatan.biomassa.pengganti.batubara>
- <https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/07/25/2913/kiprah.biodiesel.dalam.mendukung.pengembangan.energi.baru.terbarukan.capaian.program.b30.pada.semester.i.2021>
- <https://www.bpdp.or.id/industri-kelapa-sawit-mampu-bangkitkan-ekonomi-nasional-dan-media>
- <https://www.bpdp.or.id/lawan-kampanye-negatif-industri-sawit-bpdpks-gandeng-ekosistem-pendidikan>
- <https://www.bpdp.or.id/ekspor-palm-kernel-shell-ke-jepang-terus-berlangsung-di-tengah-pandemi-covid-19>
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190902091524-4-96407/bpom-larang-label-palm-oil-free-adakah-sanksi-wto>
- <https://www.bpdp.or.id/percepatan-program-peremajaan-sawit-rakyat-melalui-kemitraan>
- <https://ebtke.esdm.go.id/post/2019/12/19/2434/faq.program.mandatori.biodiesel.30.b30>
- <https://www.bpdp.or.id/program-pengembangan-dan-pemanfaatan-bahan-bakar-nabati>
- <https://ebtke.esdm.go.id/post/2019/12/18/2433/pahami.istilah.b20.b30.b100.bbn.dalam.bioenergi>
- <https://dpp-apkasindo.com/percepat-capaian-sertifikasi-pengelolaan-sawit-berkelanjutan/>
- <https://sawitindonesia.com/fp2sb-usulkan-6-langkah-percepatan-sertifikasi-ispo/>
- <https://www.bpdp.or.id/Dengar-Pendapat-Roadmap-Sawit-Jaring-Masukan-dari-Stakeholder>

<https://spks.or.id/detail-berita-dukungan-dana-bpdp-ks-untuk-sarana-dan-prasarana-sawit-fokus-di-18-provinsi>

https://disbunak.paserkab.go.id/po-content/uploads/bahan_sosialisasi_kepdirenbun_206_sdm_bpdpks.pdf

<https://www.mongabay.co.id/2020/03/01/perbaiki-tata-kelola-sawit-hadapi-berbagai-tantangan/>